

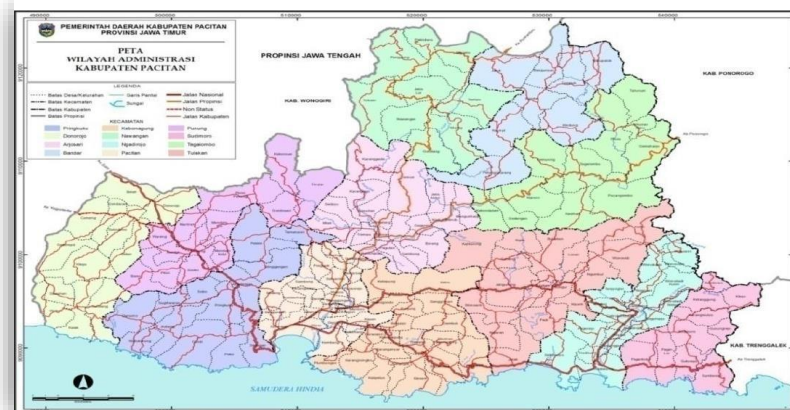
BAB II

GAMBARAN UMUM KABUPATEN PACITAN

2.1. Gambaran Geografis Kabupaten Pacitan

Secara geografis, Kabupaten Pacitan terletak di ujung barat daya wilayah Provinsi Jawa Timur, berbatasan langsung dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah) di sebelah utara, Samudera Indonesia di sebelah selatan, Kabupaten Wonogiri di sebelah barat, dan Kabupaten Trenggalek di sebelah timur.

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Kabupaten Pacitan



Sumber: RTRW Kabupaten Pacitan 2021

Gambar diatas menunjukkan batas wilayah Kabupaten Pacitan seperti penjelasan di bawah ini:

Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri

Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri

Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Pacitan terletak di sebelah Barat Daya Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Memiliki luas wilayah sebesar 1.389,87 km², sebagian besar wilayah Kabupaten Pacitan berupa bukit dan gunung, jurang terjal dan termasuk deretan Pegunungan Seribu yang membujur sepanjang Pulau Jawa. Sedangkan jika dilihat secara astronomis, Kabupaten Pacitan terletak antara 7°29'-8°29' Lintang Selatan dan 110°30'-111°43' Bujur Timur.

Secara administratif, Kabupaten Pacitan terbagi atas 12 kecamatan, 5 kelurahan dan 166 desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tulakan, yaitu 161,61 km² dan Kecamatan Tegalombo seluas 149,25 km². Sedangkan kecamatan dengan luas paling kecil adalah Kecamatan Sudimoro dengan luas 71,86 km².

2.2. Gambaran Demografi Kabupaten Pacitan

Pacitan merupakan salah satu kabupaten yang termasuk di wilayah Provinsi Jawa Timur. Menyebut Pacitan terbayang berbagai karakter yang khas yang menyertainya. Sebagaimana daerah lain di Indonesia pada umumnya, Pacitan juga mempunyai angka natalitas yang cukup tinggi. Dengan tingkat kematian rendah namun tingkat kelahirannya cukup tinggi, maka beban tanggungan pada usia kerja juga semakin besar. Akan tetapi karena keterbatasan lapangan kerja yang ada di Pacitan, sebagian warga Pacitan menjadi perantau di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Apabila ditelaah sektor pertanian masih menjadi mobil penggerak ekonomi sebagian besar masyarakat Pacitan. Akan tetapi sektor itu tidak dapat menjadi tumpuan

sepanjang tahun bagi mereka karena kondisi alam serta berjalannya kegiatan sektor pertanian masih mempunyai ketergantungan terhadap musim. Meskipun begitu sektor pertanian tetap menjadi sektor utama penggerak ekonomi.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Pacitan

Kecamatan	Total	Laju pertumbuhan penduduk per Tahun 2020-2021
Donorojo	37.838	0,45
Punung	37.316	0,60
Pringkuku	32.825	0,64
Pacitan	78.460	0,38
Kebonagung	46.718	0,56
Arjosari	41.888	0,47
Nawangan	51.630	0,76
Bandar	44.644	0,34
Tegalombo	51.630	0,43
Tulakan	83.348	0,53
Ngadirojo	47.438	0,28
Sudimoro	34.156	0,91
Total	589.108	0,51

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2021

Konsentrasi kepadatan penduduk Kabupaten Pacitan terletak pada Kecamatan Tulakan pada tahun 2020 berjumlah 83.904 jiwa. Penduduk Kabupaten Pacitan Tahun 2021 berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk tahun 2020 sebanyak 589,1 ribu jiwa. Dibandingkan dengan jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk tahun 2020, penduduk Pacitan mengalami pertumbuhan sebesar 0,51 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2021 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,41. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pacitan tahun 2021 mencapai 424 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 12 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Pacitan dengan kepadatan

sebesar 1.018 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Pringkuku sebesar 247 jiwa/km²

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten juga dipengaruhi dengan tingkat kelahiran dan kematian. Selain itu, juga dipengaruhi dengan penambahan dan perpindahan para penduduk Kabupaten Pacitan. Melihat hal tersebut, Kabupaten Pacitan perlu mengambil suatu langkah sebagai upaya mengatasi kepadatan penduduk yang tidak merata.

2.3. Gambaran Pemerintahan Kabupaten Pacitan

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya, pemerintah Kabupaten Pacitan menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, yang mana sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa. Secara administratif Kabupaten Pacitan dikepalai oleh seorang Bupati.

Visi Misi Kabupaten Pacitan

“Terwujudnya Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia”

Misi Kabuapten Pacitan ialah sebagai berikut:

1. Mewujudkan percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan pembangunan wilayah perbatasan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan hidup.
2. Mewujudkan pembangunan dan peningkatan daya saing SDM yang kukuh berpijak pada nilai-nilai agama dan budaya bangsa.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor agraris, sektor pariwisata serta sektor unggulan lainnya.
4. Menciptakan birokrasi pemerintah yang inovatif, profesional dan melayani.

Susunan pemerintahan Kabupaten Pacitan periode, terdiri dari bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, dinas/badan dan Kantor. Informasi tentang aparat Pemerintah Kabupaten Pacitan diperoleh dari Badan Kepegawaian Daerah. Penyajian data dirinci menurut golongan, tingkat pendidikan dan jenis kelamin per satuan kerja.

2.4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfoantik) Kabupaten Bekasi adalah dinas yang menyelenggarakan pemerintahan pada bidang Komunikasi Informatika persandian dan Statistik di wilayah Kabupaten Pacitan.

Dinas Komunikasi dan Informatika yang biasa juga disebut Kominfo ini berwenang untuk memberikan izin terkait dengan bidangnya dan pada daerah wilayah kerjanya. Beberapa pengurusan perizinan dibawah Dinas Komunikasi dan

Informatika, seperti izin Penyelenggara Sistem Elektronik, izin penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, izin penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

Kominfo Pacitan memiliki perangkat kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur. Pejabat PPID Kominfo Jatim merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyedia dan pelayanan informasi publik.

Visi dan Misi Diskominfo Kabupaten Pacitan

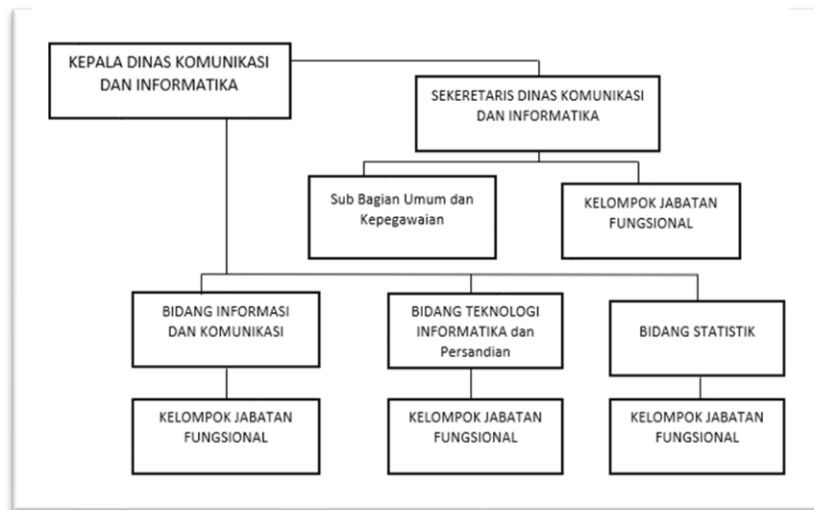
Visi

“MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT”

Misi

1. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat.
3. Membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai.
4. Meningkatkan kesalehan sosial dan harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat.

Gambar 2. 4 *Struktur Organisasi Diskominfo Kabupaten Pacitan*



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2021

Dari bagan di atas dapat diketahui kejelasan dari susunan organisasi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan. Dengan adanya struktur organisasi ini maka dapat menunjukkan tugas maupun wewenang yang dipegang oleh masing-masing pegawai. Dalam menjalankan tugasnya seluruh perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.

2.5. Wadule Pacitan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

Dalam era digital yang semakin maju, pemanfaatan teknologi informasi menjadi sangat penting, terutama dalam memfasilitasi komunikasi dan pelayanan publik. Salah satu inovasi yang muncul adalah aplikasipengaduan masyarakat berbasis web. Aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melaporkan berbagai masalah yang ada di sekitar mereka kepada pihak berwenang.

Aplikasi pengaduan masyarakat berbasis web adalah platform digital yang memungkinkan masyarakat untuk mengajukan keluhan, memberikan umpan balik, dan melaporkan masalah terkait layanan publik melalui internet. Dengan menggunakan antarmuka yang ramah pengguna, masyarakat dapat dengan mudah mengakses aplikasi ini melalui perangkat seluler atau komputer mereka. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah untuk menciptakan saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, sehingga masalah dapat diidentifikasi dan diselesaikan dengan cepat.

Gambar 2. 7 *Launching Aplikasi Wadule*



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

Aplikasi ini mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat, dibuktikan dengan banyaknya aspirasi yang masuk ke dalam Inovasi Pelayanan Pengaduan ini. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan LAPOR SP4N. Semakin terbuka informasi yang tersaji, maka permintaan informasi cenderung menurun, karena hak masyarakat untuk tahu telah tercukupi.

Tujuan utamanya adalah memberikan ruang aspirasi masyarakat, menyampaikan kritik, gagasan, serta keinginan yang kemudian sampai kepada pemerintah. Sehingga pemerintah dapat proaktif menanggapi seluruh uneg-uneg

dengan tujuan pembangunan bersama. Hal ini berdasarkan pada kerja Wadule yang dihubungkan ke seluruh instansi pemerintah di seluruh Kabupaten Pacitan. Segala jenis pelaporan akan termenejemen dengan baik. Hasilnya, aspirasi masyarakat akan cepat ditanggapi oleh instansi yang membidangi pelaporan.

Selain menghimpun aspirasi berupa keinginan warga masyarakat Pemerintah juga berharap dengan WADULE seluruh elemen dapat dengan mudah menjadi subyek pemantau kebijakan publik. Dikarenakan masyarakat adalah elemen terpenting dalam perjalanan kebijakan serta pembangunan. Tidak hanya masyarakat yang mendapatkan manfaat, pemerintah dan instansi terkait juga memperoleh keuntungan. Pertama-tama, aliran informasi yang lebih lancar membantu pihak berwenang mengidentifikasi tren masalah yang mungkin memerlukan perhatian lebih lanjut. Data-data ini dapat membantu dalam perencanaan kebijakan untuk peningkatan pelayanan publik.

Dalam memberikan kelancaran dan kemudahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Pacitan berhasil meluncurkan Aplikasi Pengaduan Masyarakat yang bernama Wadule (Wadah Aspirasi Pengaduan Layanan Secara Elektronik) pada tanggal 14 Maret 2018. Melihat perkembangan teknologi yang begitu pesat menyebabkan kemajuan pada bidang *digital*. *Gadget* seperti komputer dan *smartphone* adalah contoh produk dari kemajuan teknologi, yang mana kebanyakan masyarakat sudah memilikinya.

Hal itu menjadi kemudahan tersendiri bagi masyarakat untuk mengakses internet untuk keperluan banyak hal termasuk untuk berpartisipasi pada inovasi berbasis digital yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Pengguna atau pengakses internet di seluruh wilayah Indonesia termasuk tinggi, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Kabupaten Pacitan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Pacitan, dapat dilihat total penduduk Kabupaten Pacitan yang sudah mencapai 650 ribu lebih, sebanyak 64 persen lebih warga Pacitan telah menggunakan internet³⁶. Dengan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Pacitan khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan menaruh harapan terhadap masyarakat untuk turut serta mempunyai dan menggunakan Aplikasi wadule.

Masyarakat Kabupaten Pacitan dapat menggunakan aplikasi Wadule Pacitan untuk melaporkan permasalahannya mengenai pelayanan publik dengan cara mengunduh aplikasi Wadule pada *play store* bagi pengguna android. Setelah aplikasi Wadule Pacitan sudah terinstal, *user* akan diarahkan untuk melakukan login atau bagi yang belum mempunyai akun harus mengisi formulir identitas. Lebih jelasnya pengguna harus menginput *email* atau nomor *hand phone* serta membuat *password* untuk akun miliknya.

³⁶ Diakses pada <https://www.grindulufm.co.id/2021/09/7016-persen-warga-di-pacitan-pengakses.html> pada tanggal 10 Juni 2024 pukul 21.16

Gambar 2. 10 Tampilan Menu Aplikasi

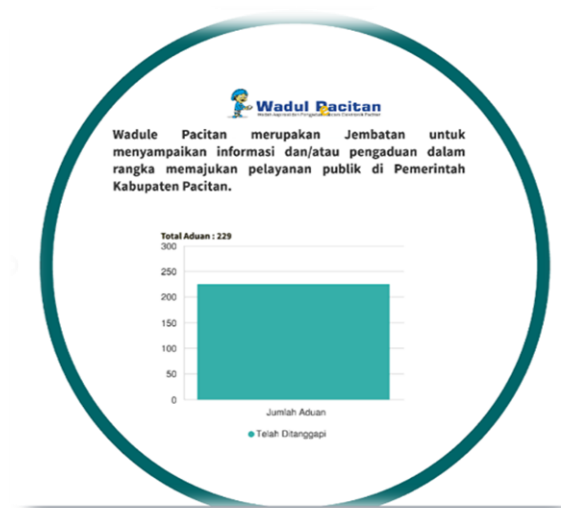


Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

Terdapat pilihan yang ditampilkan pada beranda aplikasi seperti formulir pengaduan untuk mengisi pengaduan dari masyarakat untuk melaporkan keluhannya tentang pelayanan publik. Masyarakat Kabupaten Pacitan sebelum memasukan aduannya dalam aplikasi wadule, diharuskan untuk memilah jenis laporannya masuk dalam kategori apa, lalu memberikan isi pesan aduannya, dan untuk memperkuat laporan pengaduannya masyarakat harus menambahkan bukti foto disertai lokasi detailnya. Selain itu, fitur menu aplikasi *wadule* terdapat pilihan untuk mengecek pengaduan guna melihat apakah pengaduan sudah terkirim dan ditindaklanjuti. Tentunya dengan penggunaan aplikasi Wadule Pacitan akan ada kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat Pacitan mengenai pelaporan

pengaduan pelayanan, berbeda dengan pelayanan pengaduan secara konvensional yang cenderung berbelit dan menyusahakan masyarakat. Karena pelayanan publik secara konvensional banyak kasus yang cenderung merugikan masyarakat seperti mereka yang sedang berada di luar kota tidak bisa memproses pengaduannya dan ketika mereka mengajukan pengaduan secara langsung kepada instansi atau lembaga yang terkait, proses perizinannya memakan waktu yang lama untuk memproses pengaduannya

Gambar 2. 13 Jumlah Pengaduan Aplikasi



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

Sejak peluncurannya aplikasi wadule mulai digalakkan oleh pemerintah Kabupaten Pacitan terutama oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan. Pada periode bulan Maret-Desember tahun 2018, wadule mendapatkan total aduan sebanyak 220 aduan dan telah ditanggapi oleh admin Kabupaten maupun admin Tingkat Perangkat Daerah. Untuk meningkatkan penggunaan aplikasi wadule diperlukan identifikasi lebih awal terkait kebutuhan masyarakat

dengan begitu, peran aktif masyarakat sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Sebagai Pihak pengelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan harus lebih menggalakan penyebaran informasinya kepada masyarakat. Selain itu, tidak kalah pentingnya bagi pihak pengelola yaitu memperhatikan kualitas pelayanannya, Organisasi Perangkat Daerah lainnya harus cepat tanggap juga dalam menangani aduan agar terwujud birokrasi yang responsif.

Tahun 2019 menjadi tahun kedua dari berjalannya program aplikasi wadule berjalannya aplikasi wadule Pacitan. Tahun kedua ini harusnya sudah terjadi penyempurnaan dari tahun sebelumnya. Hasil rekapitulasi perolehan aduan masuk aplikasi wadule Pacitan dan kategori aduan terhadap pelayanan dapat kita lihat. Keberhasilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan ini adalah bagaimana instansi dapat merangkul masyarakat untuk turut serta berpartisipasi menggunakan program atau kebijakan juga turut serta melakukan monitoring terhadap program yang dijalankan. Tahun kedua ini seharusnya masyarakat lebih banyak mengetahui akan aplikasi wadule sebagai sarana masyarakat untuk memberikan keluhan atau masukan terhadap pelayanan publik di Pacitan yang nantinya akan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah untuk membenahi permasalahan yang muncul.

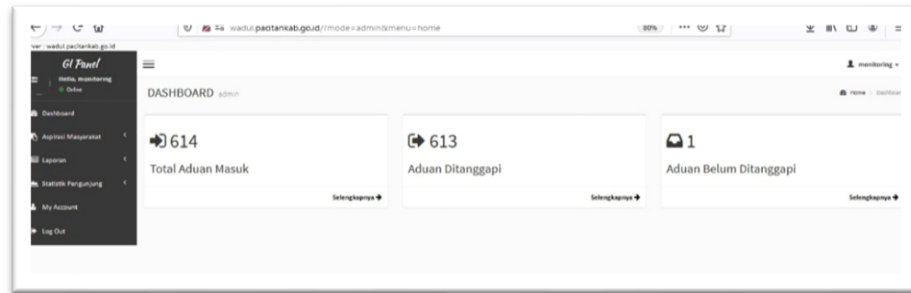
Gambar 2. 16 Jumlah Pengaduan Aplikasi wadule Tahun 2019



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

Dapat dilihat dari gambar diatas, bahwasanya pada Tahun 2019 lebih tepatnya periode Januari – Nopember 2019 menerima 296 Aduan. Sebanyak 76 orang melakukan aduannya terkait permasalahan infrastruktur, 44 orang melakukan aduan mengenai kependudukan/atau e-ktp, 17 orang menyatakan keluuhannya terkait jaringan internet, 69 orang mengaduakan permasalahannya terkait pemerintahan, 43 orang mengeluhkan permasalahan penerangan jalan dan lampu air, 21 orang mengadukan permasalahan mengenai lingkungan, 16 orang melaporkan permasalahan bencana sosial dan masyarakat. Semua pengaduan yang ada di tahun 2019 telah ditanggapi oleh admin tingkat Kabupaten maupun admin tingkat Perangkat Daerah. Perangkat Daerah yang mendapatkan aduan terbanyak ialah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Gambar 2. 19 Jumlah Pengaduan Aplikasi wadule Tahun 2020



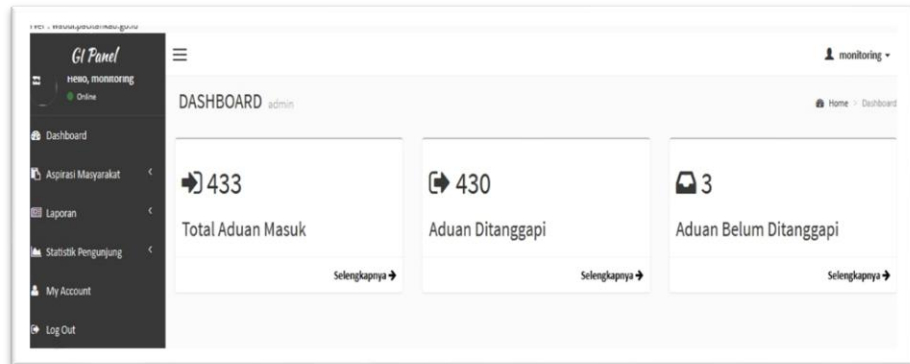
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

Pada Tahun 2020 lebih tepatnya pada akhir bulan oktober, dokumentasi resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten telah menggunakan wadule sebagai sarana pengaduan sebanyak 614 aduan, dan pada bulan tersebut yang telah ditanggapi sebanyak 613 aduan, dan aduan yang belum ditanggapi ialah 1 aduan. Peran serta dari Admin tingkat Kabupaten maupun tingkat perangkat Daerah menjadi penting, dikarenakan admin disini menjadi tumpuan keberlangsungan aplikasi wadule yang baik menjunjung tinggi aspek responsifitas.

Pada tahun berikutnya yaitu di tahun 2021, aplikasi wadule Pacitan menerima aduan sebanyak 433 dan telah ditanggapi sebanyak 430 aduan, akan tetapi terdapat 3 aduan yang belum ditanggapi. Tahun 2021 cenderung menurun daripada tahun-tahun sebelumnya. Pengaduan yang masuk pada tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Gambar 2. 22 Jumlah Pengaduan Aplikasi wadule Tahun

2021



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

Dengan jumlah aduan yang ada selama dengan ditambah penggunaan gadget serta pengakses internet bisa memunculkan beberapa kemungkinan yaitu, belum terjangkaunya seluruh masyarakat Kabupaten atau dapat dikatakan tidak terlalu banyaknya keluhan dari masyarakat Kabupaten Pacitan mengenai pelayanan publik.